



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2026
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Manajemen Risiko secara komprehensif di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5);
- 7. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2026 PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU.**

KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2026 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam

lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini memiliki Tugas dan Wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju sesuai DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 07 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas,



AKHMAD TAUFIQ, S.IP., M.Si
NIP. 197901022011011006

Tembusan Yth:

1. Bupati Mamuju di Mamuju (sebagai Laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju;
4. Kabag Pemerintahan Setdakab Mamuju di Mamuju;
5. Kabag Hukum Setdakab Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN I
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 04 TAHUN 2026
TANGGAL : 07 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU

**STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026**

NO.	PERAN	NAMA		JABATAN
1.	Pemilik Risiko	:	AKHMAD TAUFIQ, S.Ip., M.Si	Plt. Kepala Dinas
2.	Koordinator Pengelola Risiko	:	AKHMAD TAUFIQ, S.Ip., M.Si	Sekretaris Dinas
3.	Pengelola Risiko	:	ITA SARI DARMAWATI, S.Sos	Kepala Bidang Sarana dan Diseminasi
		:	SYUSWANDY HERLY, SP., M.Si	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
		:	RAHMANILLAH, S.Sos	Plt. Kepala Bidang Persandian
		:	ANDI RASMUDDIN, S.Ip	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Publik
4.	Pembantu Pengelola Risiko	:	FAUZIAH, SE., M.Si	Perencana Ahli Muda
		:	ADE IRMA, SE	Kepala Subag. Umum dan Kepegawaian
		:	SYAWAL, S.Ip	Pranata Humas (Bidang Sarana & Diseminasi)
		:	MULYANI AYU TRISNA, S.Kom	Pranata Komputer (Bidang Aplikasi dan Informatika)
		:	AYU NURFIKA T, S.I.Kom	Pranata Humas (Bidang Komunikasi dan Informatika Publik)
		:	MULIADI, ST., MT	Sandiman Ahli Muda (Bidang Persandian)

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 07 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas,



AKHMAD TAUFIQ, S.IP., M.Si
NIP. 197901022011011006

FORMULIR PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Nama Unit Kerja/OPD

: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju

Nama Pemilik Risiko

: Akhmad Taufiq, S.Ip, M.Si

Selera Risiko

: 5

Jabatan Pemilik Risiko

: Plt. Kepala Dinas

Nama Koordinator Pengelola Risiko

: Akhmad Taufiq, S.Ip, M.Si

Jabatan Koordinator Pengelola Risiko

: Sekertaris

Periode Penerapan

: 2026

1. Identifikasi sasaran strategis / program strategis

Visi	Mamuju Keren (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)		
Misi	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional		
Sasaran Strategis Pemda	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik		
Indikator Kinerja Sasaran Pemda	1. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
	2. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan melalui e-office,e-surat dan de-arsip untuk efesiensi birokrasi		
	3. Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Jalan Transformasi Digital Pemerintahan Kabupaten Mamuju		
	4. Penyusunan Regulasi Daerah Terkait Perlindungan Data dan Keamanan Informasi Digital		
	5. Pembagunan Ekosistem Sistem Informasi terpadu antar-OPD untuk Memperkuat Sinergi dan Efisiensi		
Sasaran Strategis OPD	1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilatas Informasi Publik Bagi Masyarakat		
	2. Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan		
	3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembang		
	4. Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah		
	5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Kinerja Sasaran OPD	1. Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik		
	2. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi		
	3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
	4. Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		
	5. Predikat Laporan Kinerja Perangkat Daerah		
Uraian Program/Kegiatan	:	1	Program 1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Indikator Program 1) 1. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 2. Persentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pelayanan Umum Kantor
	:		- Kegiatan 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Indikator Kegiatan 1) Persentase Keselerasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	:		- Kegiatan 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Indikator Kegiatan 2) Persentase Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia
	:		- Kegiatan 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Indikator Kegiatan 3) Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar
	:		- Kegiatan 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Indikator Kegiatan 4) Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	:		- Kegiatan 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (Indikator Kegiatan 5) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar
	:		- Kegiatan 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Indikator Kegiatan 5) Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	:		- Kegiatan 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Indikator Kegiatan 6) Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	:	2	Program 2. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik (Indikator Program 2) Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah

			Program 3. Pengelolaan Aplikasi Informatika	(Indikator Program 3) Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi
		3	- Kegiatan 1. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(Indikator Kegiatan 1) Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo
			Program 4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	(Indikator Program 4) Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		4	- Kegiatan 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	(Indikator Kegiatan 1) Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah yang Akurat dan Dapat Diandalkan
			Program 5. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	(Indikator Program 4) Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
		5	- Kegiatan 1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(Indikator Kegiatan 1) Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
			- Kegiatan 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	(Indikator Kegiatan 2) Persentase Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi
Bidang Terkait Program/Kegiatan	:	1	Sekretariat	
		2	Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi	
		3	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	
		4	Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	
		5	Bidang Persandian	

Mamuju, 07 Januari 2026
Pit. KEPALA DINAS



Akhmad Taufiq, S.Ip, M.Si
Nip. 197901022011011006

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Tahun : 2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Tujuan SPIP
			Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Pemilik/Pengelola	Uraian Sebab	Sumber		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tujuan : OPTIMALISASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DENGAN MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL YANG AMAN BERBASIS DATA										
1	Sasaran Startegis : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilatas Informasi Publik Bagi Masyarakat Proqram : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik									
		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah									
		Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Informasi pembangunan dan kebijakan Pemkab Mamuju tidak tersampaikan secara merata ke masyarakat di wilayah pelosok/pedalaman.	Kominfosip. 1.1.1.1	Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi dan Bidang KIP	Kondisi geografis Mamuju yang memiliki wilayah perbukitan/pesisir dengan beberapa titik blank spot; publikasi terlalu bertumpu pada media digital/sosial.	internal/ eksternal	C/UC	Terjadinya kesenjangan informasi (information gap); rendahnya partisipasi masyarakat dalam program daerah; target persentase jangkauan IKP tidak optimal	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfosip dan Masyarakat	Efektif
			Munculnya Sengketa Informasi Publik akibat keterlambatan atau penolakan pemberian informasi kepada pemohon.	Kominfosip. 1.1.1.2		Belum optimalnya komitmen PPID Pelaksana di setiap PD untuk menyeter data berkala; dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) belum mutakhir.	internal/ eksternal		Pemkab Mamuju berisiko menghadapi gugatan di Komisi Informasi; penurunan citra transparansi daerah; menurunkan persentase kepatuhan standar IKP.	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfosip dan Masyarakat	Efektif

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Tujuan SPIP
			Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Pemilik/Pengelola	Uraian Sebab	Sumber		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Sasaran Startegis : Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi									
		Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi									
		Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo	Terganggunya konektivitas dan layanan aplikasi SPBE akibat masalah geografis (blank spot) dan stabilitas jaringan (Infrastruktur & Jaringan)	Kominfo SIP. 1.2.1.1	Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	Kondisi geografis beberapa wilayah Mamuju yang menantang; ketergantungan pada satu provider utama; belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra-pemerintah daerah.	internal/ eksternal	C/UC	Layanan publik digital di tingkat kecamatan/desa terhambat; pengumpulan data evaluasi SPBE dari OPD pinggiran terlambat; menurunkan persentase tata kelola e-gov yang andal.	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfo SIP dan Masyarakat	Efektif
			Terjadinya tumpang tindih (duplikasi) aplikasi antar-PD dan minimnya integrasi data untuk aplikasi dan integrasi sistem	Kominfo SIP. 1.2.1.2	Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	Masih ada PD yang membangun aplikasi sendiri tanpa berkoordinasi/berbagi pakai dengan Kominfo; belum optimalnya implementasi SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah).	internal/ eksternal	C/UC	Pemborosan anggaran daerah; masyarakat/ASN harus membuat banyak akun berbeda; nilai kematangan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sulit meningkat	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfo SIP dan Masyarakat	
3	Sasaran Startegis : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)									
		Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah									

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Tujuan SPIP
			Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Pemilik/Pengelola	Uraian Sebab	Sumber		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah yang Akurat dan Dapat Diandalkan	Belum tersedianya data statistik sektoral yang sesuai dengan standar data SDI	Kominfo SIP. 1.3.1.1	Bidang Statistik	Masih adanya data statistik sektoral yang belum dilengkapi dengan metadata statistik	Eksternal	UC	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik belum dapat dilaksanakan sepenuhnya	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju dan BPS	Efektif
	Sasaran Startegis : Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi									
	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah									
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Insiden siber berupa peretasan, serangan ransomware, atau kebocoran data pada sistem administrasi dan layanan publik pemda.	Kominfo SIP. 1.4.1.1	Bidang Persandian	Belum semua sistem bersertifikasi ISO 27001 (IKAMI masih dalam tahap pemenuhan); pemanfaatan Sertifikat Elektronik/TTE belum merata di semua lini dokumen penting; kurangnya kesadaran keamanan pengguna (user awareness).	internal/ eksternal	C/UC	Data sensitif daerah bocor; layanan e-gov lumpuh total; menurunnya kepercayaan publik terhadap digitalisasi Pemkab Mamuju.	PD Kabupaten Mamuju	Efektif
			Terjadinya pemalsuan dokumen atau penolakan legitimasi hukum atas dokumen digital pemerintah.	Kominfo SIP. 1.4.1.2	Bidang Persandian	Belum meratanya aktivasi dan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi BSSN bagi pejabat struktural/fungsional; kelalaian dalam menjaga kerahasiaan passphrase.	internal/ eksternal	C/UC	Risiko repudiation (penolakan keabsahan dokumen); proses birokrasi mandek; pemenuhan indikator tata kelola persandian menjadi rendah.	PD Kabupaten Mamuju	Efektif

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Tujuan SPIP
			Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Pemilik/Pengelola	Uraian Sebab	Sumber		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Persentase Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi	Terganggunya keterhubungan alat/aplikasi persandian (misal: pengiriman surat elektronik terenkripsi/Sanapati atau aplikasi sejenis) antar-titik simpul sandi.	Kominfo SIP. 1.4.1.3	Bidang Persandian	Masalah stabilitas jaringan intra-pemerintah; adanya wilayah penempatan simpul yang mengalami gangguan teknis atau blank spot geografis di Mamuju.	internal/ eksternal	C/UC	Persentase operasionalisasi layanan sandi menurun; pengiriman dokumen rahasia daerah terhambat atau terpaksa menggunakan jalur komunikasi terbuka yang tidak aman.	PD Kabupaten Mamuju	Efektif
5	Sasaran Startegis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Laporan Kinerja Perangkat Daerah									
	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Bersentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 2. Bersentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 3. Bersentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pelayanan Umum Kantor									
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselerasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak selesai tepat waktu atau tidak selaras dengan RPJMD, Renstra, dan Renja akibat data kinerja serta koordinasi antar bidang belum optimal.	Kominfo SIP. 1.5.1.1	Sekretariat	Data capaian kinerja terlambat; perubahan kebijakan perencanaan; koordinasi bidang belum konsisten; reviu dokumen belum memadai.	Internal	C	Perencanaan program dan kegiatan kurang terarah, target kinerja tidak konsisten, dan proses penganggaran terhambat.	Diskominfo SIP Kabupaten Mamuju	Efektif
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak tepat jumlah, tepat waktu, atau tepat penerima akibat data kepegawaian, perubahan status pegawai, dan proses verifikasi belum mutakhir.	Kominfo SIP. 1.5.1.2	Sekretariat	Keterlambatan dalam melakukan Pemuktahiran Data Pegawai	Internal	C	Potensi Gaji dan Tunjangan tidak terbayarkan tepat pada waktunya	ASN Diskominfo SIP Kabupaten Mamuju	Efektif

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Tujuan SPIP
			Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Pemilik/Pengelola	Uraian Sebab	Sumber		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	Pencacatan Aset Tidak Akurat/Terlambat dan Risiko Pemanfaatan dan Pemeliharaan	Kominfo SIP. 1.5.1.3	Sekretariat	Koordinasi yang lemah antara Pengurus Barang Pengguna dengan PPTK saat serah terima barang hasil pengadaan	Internal	C	Pencatatan dapat memicu selisih antara nilai fisik dan nilai akuntansi (mempengaruhi laporan keuangan daerah)	Diskominfo SIP Kabupaten Mamuju	Efektif
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan administrasi dan pelayanan kantor terhambat.	Kominfo SIP. 1.5.1.4	Sekretariat	Daftar kebutuhan barang dan logistik kantor yang belum terkendali	Internal	C	Pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan PD tidak optimal.	Diskominfo SIP Kabupaten Mamuju	Efektif
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	Keterlambatan dalam proses pengadaan yang disebabkan proses pengadaan melalui e-purchasing tidak sesuai jadwal	Kominfo SIP. 1.5.1.5	Sekretariat	Spesifikasi teknis tidak rinci; e-katalog tidak menyediakan barang sesuai kebutuhan; survei harga terbatas; evaluasi penyedia belum memadai.	Internal	C	Potensi keterlambatan pengadaan barang serta potensi temuan pengadaan meningkat	Diskominfo SIP Kabupaten Mamuju	Efektif
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tagihan jasa listrik dan air melebihi batas pagu bulanan	Kominfo SIP. 1.5.1.6	Sekretariat	Pemakaian tidak terkontrol	internal/ eksternal	C	Kegiatan pelayanan kantor terganggu dan risiko tunggakan atau pemborosan belanja meningkat.	Diskominfo SIP Kabupaten Mamuju	Efektif
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terlambat sehingga dukungan mobilitas kegiatan PD tidak optimal.	Kominfo SIP. 1.5.1.7	Sekretariat	Jadwal servis dan pajak tidak dipantau berkala; kerusakan terlambat dilaporkan; dokumen kendaraan belum tertata; anggaran pemeliharaan terbatas.	Internal	C	Kendaraan dinas tidak siap pakai, biaya perbaikan meningkat, dan risiko kehilangan manfaat aset bertambah.	Diskominfo SIP Kabupaten Mamuju	Efektif

ANALISIS RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : **DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN**
Tahun : 2025

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Dampak		Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu		
		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kominfosip.1.1.1.1	Informasi pembangunan dan kebijakan Pemkab Mamuju tidak tersampaikan secara merata ke masyarakat di wilayah pelosok/pedalaman.	Terjadinya kesenjangan informasi (information gap); rendahnya partisipasi masyarakat dalam program daerah; target persentase jangkauan IKP tidak optimal.	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfosip dan Masyarakat	2	4	13	Ada	Mengintegrasikan diseminasi digital dengan penguatan media konvensional. Mengoptimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan/desa, memaksimalkan siaran keliling (mobil informasi), dan menyusun tata kelola kerja sama media massa yang transparan	Memadai	2	2	7
Kominfosip.1.1.1.2	Munculnya Sengketa Informasi Publik akibat keterlambatan atau penolakan pemberian informasi kepada pemohon.	Pemkab Mamuju berisiko menghadapi gugatan di Komisi Informasi; penurunan citra transparansi daerah; menurunkan persentase kepatuhan standar IKP.	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfosip dan Masyarakat	4	4	19	Ada	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Pemkab Mamuju dan sosialisasi ke seluruh PPID pelaksana di setiap PD	Belum Memadai	3	2	10

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Dampak		Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu		
		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kominfosip.1.2.1.1	Terganggunya konektivitas dan layanan aplikasi SPBE akibat masalah geografis (blank spot) dan stabilitas jaringan (Infrastruktur & Jaringan)	Layanan publik digital di tingkat kecamatan/desa terhambat; pengumpulan data evaluasi SPBE dari OPD pinggiran terlambat; menurunkan persentase tata kelola e-gov yang andal.	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfosip dan Masyarakat	4	4	19	Ada	Penyusunan Regulasi terkait penyelenggaraan SPBE lingkup Pemkab Mamuju	Belum Memadai	3	3	14
Kominfosip.1.2.1.2	Terjadinya tumpang tindih (duplikasi) aplikasi antar-PD dan minimnya integrasi data untuk aplikasi dan integrasi sistem	Pemborosan anggaran daerah; masyarakat/ASN harus membuat banyak akun berbeda; nilai kematangan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sulit meningkat.	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfosip dan Masyarakat	4	4	19	Ada	Mengaktifkan rapat koordinasi rutin Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Mamuju (melibatkan Bappepan, Bagian Organisasi, BPKAD, dll.) untuk melakukan monitoring pengisian 47 indikator evaluasi SPBE secara real time	Belum Memadai	3	3	14
Kominfosip.1.3.1.1	Belum tersedianya data statistik sektoral yang sesuai dengan standar data SDI	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik belum dapat dilaksanakan sepenuhnya	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju dan BPS	4	4	19	Ada	Penyusunan regulasi terkait penyelenggaraan SDI lingkup Pemkab Mamuju dan pembinaan statistik sektoral	Belum Memadai	3	2	10

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Dampak		Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu		
		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kominfosip.1.4.1.1	Insiden siber berupa peretasan, serangan ransomware, atau kebocoran data pada sistem administrasi dan layanan publik pemda.	Data sensitif daerah bocor; layanan e-gov lumpuh total; menurunnya kepercayaan publik terhadap digitalisasi Pemkab Mamuju.	PD Kabupaten Mamuju	4	4	19	Ada	Koordinasi lintas sektor, melakukan registrasi langsung ke PD dan evaluasi IKAMI	Belum Memadai	3	3	14
Kominfosip.1.4.1.2	Terjadinya pemalsuan dokumen atau penolakan legitimasi hukum atas dokumen digital pemerintah.	Risiko repudiation (penolakan keabsahan dokumen); proses birokrasi mandek; pemenuhan indikator tata kelola persandian menjadi rendah.	PD Kabupaten Mamuju	2	4	13	Ada	Mempercepat asistensi aktivasi Sertifikat Elektronik yang bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN secara jemput bola ke PD, serta mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan passphrase (PIN) TTE	Memadai	1	2	3
Kominfosip.1.4.1.3	Terganggunya keterhubungan alat/aplikasi persandian (misal: pengiriman surat elektronik terenkripsi/Sanapati atau aplikasi sejenis) antar-titik simpul sandi.	Persentase operasionalisasi layanan sandi menurun; pengiriman dokumen rahasia daerah terhambat atau terpaksa menggunakan jalur komunikasi terbuka yang tidak aman.	PD Kabupaten Mamuju	4	4	19	Ada	Masih menggunakan jalur komunikasi terbuka yaitu surat sanapati di distribusikan oleh pegawai yang bertanggung jawab pada email sanapati	Belum Memadai	3	3	14

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Dampak		Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu		
		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kominfosip.1.5.1.1	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak selesai tepat waktu atau tidak selaras dengan RPJMD, Renstra, dan Renja akibat data kinerja serta koordinasi antar bidang belum optimal.	Perencanaan program dan kegiatan kurang terarah, target kinerja tidak konsisten, dan proses penganggaran terhambat.	Diskominfosip Kabupaten Mamuju	2	2	7	Ada	Koordinasi internal penyusunan dokumen perencanaan, reviu sekretariat, dan penyesuaian dokumen dengan pagu, indikator, dan evaluasi capaian kinerja.	Memadai	1	2	3
Kominfosip.1.5.1.2	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak tepat jumlah, tepat waktu, atau tepat penerima akibat data kepegawaian, perubahan status pegawai, dan proses verifikasi belum mutakhir.	Potensi Gaji dan Tunjangan tidak terbayarkan tepat pada waktunya	ASN Diskominfosip Kabupaten Mamuju	2	3	11	Ada	Verifikasi daftar gaji, pembaruan data pegawai, dan rekonsiliasi dengan dokumen kepegawaian.	Memadai	1	2	3
Kominfosip.1.5.1.3	Pencacatan Aset Tidak Akurat/Terlambat dan Risiko Pemanfaatan dan Pemeliharaan	Pencatatan dapat memicu selisih antara nilai fisik dan nilai akuntansi (mempengaruhi laporan keuangan daerah)	Diskominfosip Kabupaten Mamuju	3	2	10	Ada	Rekonsiliasi data aset antara Pengurus Barang, Pejabat Keuangan, dan Bidang Aset Daerah secara periodik (bulanan/triwulanan)	Memadai	1	2	3
Kominfosip.1.5.1.4	Kegiatan administrasi dan pelayanan kantor terhambat.	Pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan PD tidak optimal.	Diskominfosip Kabupaten Mamuju	2	2	7	Ada	Identifikasi ketersediaan kebutuhan barang dan melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan umum kantor	Memadai	2	2	7

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Dampak		Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu		
		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kominfosip.1.5.1.5	Keterlambatan dalam proses pengadaan yang disebabkan proses pengadaan melalui e-purchasing tidak sesuai jadwal	Potensi keterlambatan pengadaan barang serta potensi temuan pengadaan meningkat	Diskominfosip Kabupaten Mamuju	3	2	10	Ada	Penyusunan spesifikasi teknis, survei harga, pemilihan penyedia, dan pemeriksaan hasil pengadaan.	Memadai	2	2	7
Kominfosip.1.5.1.6	Tagihan jasa listrik dan air melebihi batas pagu bulanan	Kegiatan pelayanan kantor terganggu dan risiko tunggakan atau pemborosan belanja meningkat.	Diskominfosip Kabupaten Mamuju	2	2	7	Ada	Melakukan upaya penghematan pemakaian yang tidak penting	Memadai	2	2	7
Kominfosip.1.5.1.7	Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terlambat sehingga dukungan mobilitas kegiatan PD tidak optimal.	Kendaraan dinas tidak siap pakai, biaya perbaikan meningkat, dan risiko kehilangan manfaat aset bertambah.	Diskominfosip Kabupaten Mamuju	2	2	7	Ada	Pencatatan kendaraan, pemantauan pajak, servis berkala, dan dokumen pemeliharaan kendaraan dinas.	Memadai	1	2	3

DAFTAR RISIKO PRIORITAS UNIT KERJA

Nama Unit Pemilik Risiko : **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Tahun : 2026

Selera Risiko Pemilik Risiko: 5

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko Residu		
		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5
Kominfosip.1.1.1.1	Informasi pembangunan dan kebijakan Pemkab Mamuju tidak tersampaikan secara merata ke masyarakat di wilayah pelosok/pedalaman.	2	2	7
Kominfosip.1.1.1.2	Munculnya Sengketa Informasi Publik akibat keterlambatan atau penolakan pemberian informasi kepada pemohon.	3	2	10
Kominfosip.1.2.1.1	Terganggunya konektivitas dan layanan aplikasi SPBE akibat masalah geografis (blank spot) dan stabilitas jaringan (Infrastruktur & Jaringan)	3	3	14
Kominfosip.1.2.1.2	Terjadinya tumpang tindih (duplikasi) aplikasi antar-PD dan minimnya integrasi data untuk aplikasi dan integrasi sistem	3	3	14
Kominfosip.1.3.1.1	Belum tersedianya data statistik sektoral yang sesuai dengan standar data SDI	3	2	10
Kominfosip.1.4.1.1	Insiden siber berupa peretasan, serangan ransomware, atau kebocoran data pada sistem administrasi dan layanan publik pemda.	3	3	14
Kominfosip.1.4.1.2	Terjadinya pemalsuan dokumen atau penolakan legitimasi hukum atas dokumen digital pemerintah.	1	2	3
Kominfosip.1.4.1.3	Terganggunya keterhubungan alat/aplikasi persandian (misal: pengiriman surat elektronik terenkripsi/Sanapati atau aplikasi sejenis) antar-titik simpul sandi.	3	3	14
Kominfosip.1.5.1.1	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak selesai tepat waktu atau tidak selaras dengan RPJMD, Renstra, dan Renja akibat data kinerja serta koordinasi antar bidang belum optimal.	1	2	3
Kominfosip.1.5.1.2	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak tepat jumlah, tepat waktu, atau tepat penerima akibat data kepegawaian, perubahan status pegawai, dan proses verifikasi belum mutakhir.	1	2	3
Kominfosip.1.5.1.3	Pencacatan Aset Tidak Akurat/Terlambat dan Risiko Pemanfaatan dan Pemeliharaan	1	2	3
Kominfosip.1.5.1.4	Kegiatan administrasi dan pelayanan kantor terhambat.	2	2	7
Kominfosip.1.5.1.5	Keterlambatan dalam proses pengadaan yang disebabkan proses pengadaan melalui e-purchasing tidak sesuai jadwal	2	2	7
Kominfosip.1.5.1.6	Tagihan jasa listrik dan air melebihi batas pagu bulanan	2	2	7
Kominfosip.1.5.1.7	Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terlambat sehingga dukungan mobilitas kegiatan PD tidak optimal.	1	2	3

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama Unit Pemilik Risiko : **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
Tahun : 2026

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Pernyataan Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Pemilik/Penanggu ng Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Informasi pembangunan dan kebijakan Pemkab Mamuju tidak tersampaikan secara merata ke masyarakat di wilayah pelosok/pedalaman.	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.1.1.1	Mengintegrasikan diseminasi digital dengan penguatan media konvensional. Mengoptimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan/desa, memaksimalkan siaran keliling (mobil informasi), dan menyusun tata kelola kerja sama media massa yang transparan	Diseminasi dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju tidak tersampaikan kepada masyarakat	Kondisi geografis Mamuju yang memiliki wilayah perbukitan/pesisir dengan beberapa titik blank spot; publikasi terlalu bertumpu pada media digital/sosial.	Melakukan Pembinaan KIM di Kecamatan dengan Memprioritaskan KIM yang aktif melakukan Informasi kepada masyarakat	Pengendalian Penyebaran Informasi	Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi dan Bidang KIP	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	12 Bulan
2	Munculnya Sengketa Informasi Publik akibat keterlambatan atau penolakan pemberian informasi kepada pemohon.	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.1.1.2	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Pemkab Mamuju dan sosialisasi ke seluruh PPID pelaksana di setiap PD	Terjadinya sengketa informasi jika Pemkab. Mamuju belum memiliki kebijakan terkait penyelenggaraan layanan informasi publik	Belum optimalnya komitmen PPID Pelaksana di setiap PD untuk menyedor data berkala; dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) belum mutakhir.	Percepatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kabupaten Mamuju	Pengendalian Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi dan Bidang KIP	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	12 Bulan

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Pernyataan Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Pemilik/Penanggu ng Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Terganggunya konektivitas dan layanan aplikasi SPBE akibat masalah geografis (blank spot) dan stabilitas jaringan (Infrastruktur & Jaringan)	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.2.1.1	Penyusunan Regulasi terkait penyelenggaraan SPBE lingkup Pemkab Mamuju	Efisiensi anggaran aplikasi dan kestabilan akses jaringan e-government di lingkungan Pemkab Mamuju.	Kondisi geografis beberapa wilayah Mamuju yang menantang; ketergantungan pada satu provider utama; belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra-pemerintah daerah.	Pengusulan kepada Kementerian KOMDIGI melalui BAKTI KOMDIGI mengenai jaringan baru khususnya pada area wilayah blankspot	Pengendalian Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Bidang Infrastuktur dan Teknologi Digital	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo	12 Bulan
4	Terjadinya tumpang tindih (duplikasi) aplikasi antar-PD dan minimnya integrasi data untuk aplikasi dan integrasi sistem	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.2.1.2	Mengaktifkan rapat koordinasi rutin Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Mamuju (melibatkan Bappepan, Bagian Organisasi, BPKAD, dll.) untuk melakukan monitoring pengisian 47 indikator evaluasi SPBE secara real-time	Pengimplementasian Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi tidak efektif dan efisien	Masih ada PD yang membangun aplikasi sendiri tanpa berkoordinasi/berba gi pakai dengan Kominfo; belum optimalnya implementasi SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	Memetakan kembali prioritas perluasan jaringan intra-pemerintah, mengoptimalkan pusat data (Government Cloud/PDN) dan atau integrasi jaringan yang terpusat di Dinas Kominfosip	Pengendalian Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Bidang Infrastuktur dan Teknologi Digital	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo	12 Bulan
5	Belum tersedianya data statistik sektoral yang sesuai dengan standar data SDI	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.3.1.1	Penyusunan regulasi terkait penyelenggaraan SDI lingkup Pemkab Mamuju dan pembinaan statistik sektoral	Kualitas data statistik sektoral yang tidak sesuai dengan standar data SDI	Masih adanya data statistik sektoral yang belum dilengkapi dengan metadata statistik	Melakukan pembinaan Statistik Sektoral secara berkala untuk menghasilkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah yang Akurat dan Dapat Diandalkan	Pengendalian Statistik	Bidang Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah yang Akurat dan Dapat Diandalkan	12 Bulan

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Pernyataan Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Pemilik/Penanggu ng Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Insiden siber berupa peretasan, serangan ransomware, atau kebocoran data pada sistem administrasi dan layanan publik pemda.	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.4.1.1	Koordinasi lintas sektor, melakukan registrasi langsung ke PD dan evaluasi IKAMI	Birokrasi pelayanan publik akan terhambat	Belum semua sistem bersertifikasi ISO 27001 (IKAMI masih dalam tahap pemenuhan); pemanfaatan Sertifikat Elektronik/TTE belum merata di semua lini dokumen penting; kurangnya kesadaran keamanan pengguna (user awareness).	Mengoptimalkan peran Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) daerah yang telah dibentuk, mempercepat peningkatan skor Indeks Keamanan Informasi (IKAMI)	Pengendalian Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Bidang Persandian	1. Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	12 Bulan
7	Terjadinya pemalsuan dokumen atau penolakan legitimasi hukum atas dokumen digital pemerintah.	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.4.1.2	Mempercepat asistensi aktivasi Sertifikat Elektronik yang bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN secara jemput bola ke PD, serta mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan passphrase (PIN) TTE	Masih adanya pegawai yang telah melakukan aktivasi TTE tapi belum memahami cara pemanfaatan TTE	Belum meratanya aktivasi dan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi BSSN bagi pejabat struktural/fungsional; kelalaian dalam menjaga kerahasiaan passphrase.	memperluas kewajiban aktivasi dan penggunaan Tanda Tangan Digital/TTE bagi seluruh pejabat/ASN pengambil keputusan	Pengendalian Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Bidang Persandian	1. Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	12 Bulan

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Pernyataan Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Pemilik/Penanggu ng Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Terganggunya keterhubungan alat/aplikasi persandian (misal: pengiriman surat elektronik terenkripsi/Sanapati atau aplikasi sejenis) antar-titik simpul sandi.	Mengurangi Dampak	Kominfo ip.1.4.1.3	Masih menggunakan jalur komunikasi terbuka yaitu surat sanapati di distribusikan oleh pegawai yang bertanggung jawab pada email sanapati	Terjadinya kebocoran informasi yang sifatnya rahasia	Masalah stabilitas jaringan intra-pemerintah; adanya wilayah penempatan simpul yang mengalami gangguan teknis atau blank spot geografis di Mamuju.	Membangun atau mengalokasikan jalur komunikasi virtual yang terisolasi (VPN khusus/jaringan intra-pemda) untuk menghubungkan simpul-simpul persandian utama	Pembinaan SDM	Bidang Persandian	2. Persentase Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi	12 Bulan
9	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak selesai tepat waktu atau tidak selaras dengan RPJMD, Renstra, dan Renja akibat data kinerja serta koordinasi antar bidang belum optimal.	Mengurangi Dampak	Kominfo ip.1.5.1.1	Koordinasi internal penyusunan dokumen perencanaan, reuiu sekretariat, dan penyesuaian dokumen dengan pagu, indikator, dan evaluasi capaian kinerja	Laporan realisasi capaian kinerja bidang tidak konsisten dilaporkan sesuai jadwal perencanaan	Data capaian kinerja terlambat; perubahan kebijakan perencanaan; koordinasi bidang belum konsisten; reuiu dokumen belum memadai.	Melakukan monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja	Pembinaan SDM	Sekretariat	Persentase Keselerasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan
10	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak tepat jumlah, tepat waktu, atau tepat penerima akibat data kepegawaian, perubahan status pegawai, dan proses verifikasi belum mutakhir.	Mengurangi Dampak	Kominfo ip.1.5.1.2	Verifikasi daftar gaji, pembaruan data pegawai, dan rekonsiliasi dengan dokumen kepegawaian.	Kesadaran pegawai untuk melakukan pembaharuan data pegawai dan keluarga yang sering diabaikan	Keterlambatan dalam melakukan Pemuktahiran Data Pegawai	Melakukan rekonsiliasi data pegawai dan keluarga setiap awal bulan serta membuat bukti verifikasi sebelum pembayaran gaji/tunjangan.	Pembinaan SDM	Sekretariat	Persentase Dokumen/Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia	12 Bulan
11	Pencacatan Aset Tidak Akurat/Terlambat dan Risiko Pemanfaatan dan Pemeliharaan	Mengurangi Dampak	Kominfo ip.1.5.1.3	Rekonsiliasi data aset antara Pengurus Barang, Pejabat Keuangan, dan Bidang Aset Daerah secara periodik (bulanan/triwulanan)	Pencatatan data aset yang tidak akurat/terlambat	Koordinasi yang lemah antara Pengurus Barang Pengguna dengan PPTK saat serah terima barang hasil pengadaan	Rekonsialiasi data aset secara periodik bulanan/triwulan/se mesteran	Pembinaan SDM	Sekretariat	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	12 Bulan

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Pernyataan Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Pemilik/Penanggu ng Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Kegiatan administrasi dan pelayanan kantor terhambat.	Mengurangi Dampak	Kominfo sip.1.5.1.4	Identifikasi ketersediaan kebutuhan barang dan melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan umum kantor.	Daftar kebutuhan barang dan logistik kantor belum berbasis data pemakaian	Daftar kebutuhan barang dan logistik kantor yang belum terkendali	Membuat kartu kendali kebutuhan dan logistik kantor	Pembinaan SDM	Sekretariat	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
13	Keterlambatan dalam proses pengadaan yang disebabkan proses pengadaan melalui e-purchasing tidak sesuai jadwal	Mengurangi Dampak	Kominfo sip.1.5.1.5	Penyusunan spesifikasi teknis, survei harga, pemilihan penyedia, dan pemeriksaan hasil pengadaan.	Spesifikasi barang, ketersediaan pagu dan rencana kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi	Spesifikasi teknis tidak rinci; e-katalog tidak menyediakan barang sesuai kebutuhan; survei harga terbatas; evaluasi penyedia belum memadai.	Membuat kartu kendali kebutuhan pengadaan yang menjadi prioritas dan sesuai ketersediaan pagu anggaran	Pembinaan SDM	Sekretariat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	12 Bulan
14	Tagihan jasa listrik dan air melebihi batas pagu bulanan	Mengurangi Dampak	Kominfo sip.1.5.1.6	Melakukan upaya penghematan pemakaian yang tidak penting	Tagihan akan jasa sumber daya melebihi batas pagu bulanan	Pemakaian tidak terkontrol	Melakukan upaya penghematan pemakaian sumber daya yang tidak penting	Pembinaan SDM	Sekretariat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12 Bulan
15	Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terlambat sehingga dukungan mobilitas kegiatan PD tidak optimal.	Mengurangi Dampak	Kominfo sip.1.5.1.7	Pencatatan kendaraan, pemantauan pajak, servis berkala, dan dokumen pemeliharaan kendaraan dinas.	Riwayat servis, jadwal jatuh tempo pajak, dan laporan kerusakan belum selalu diperbarui tepat waktu.	Jadwal servis dan pajak tidak dipantau berkala; kerusakan terlambat dilaporkan; dokumen kendaraan belum tertata; anggaran pemeliharaan terbatas.	Membuat kartu kendali kendaraan, jadwal servis dan pajak, serta laporan kondisi kendaraan secara berkala.	Pembinaan SDM	Sekretariat	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan

ANALISIS AKAR MASALAH

Nama Unit Pemilik Risiko : **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Tahun : 2026

Selera Risiko Pemilik Risiko: 5

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Penyebab	Kode Penyebab
1	2	3	4	5
1	Kominfosip.1.1.1.1	Informasi pembangunan dan kebijakan Pemkab Mamuju tidak tersampaikan secara merata ke masyarakat di wilayah pelosok/pedalaman.	Kondisi geografis Mamuju yang memiliki wilayah perbukitan/pesisir dengan beberapa titik blank spot; publikasi terlalu bertumpu pada media digital/sosial.	Kominfosip.1.1.1.1
2	Kominfosip.1.1.1.2	Munculnya Sengketa Informasi Publik akibat keterlambatan atau penolakan pemberian informasi kepada pemohon.	Belum optimalnya komitmen PPID Pelaksana di setiap PD untuk menyetor data berkala; dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) belum mutakhir.	Kominfosip.1.1.1.2
3	Kominfosip.1.2.1.1	Terganggunya konektivitas dan layanan aplikasi SPBE akibat masalah geografis (blank spot) dan stabilitas jaringan (Infrastruktur & Jaringan)	Kondisi geografis beberapa wilayah Mamuju yang menantang; ketergantungan pada satu provider utama; belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra-pemerintah daerah.	Kominfosip.1.2.1.1

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Penyebab	Kode Penyebab
1	2	3	4	5
4	Kominfo SIP.1.2.1.2	Terjadinya tumpang tindih (duplikasi) aplikasi antar-PD dan minimnya integrasi data untuk aplikasi dan integrasi sistem	Masih ada PD yang membangun aplikasi sendiri tanpa berkoordinasi/berbagi pakai dengan Kominfo; belum optimalnya implementasi SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah).	Kominfo SIP.1.2.1.2
5	Kominfo SIP.1.3.1.1	Belum tersedianya data statistik sektoral yang sesuai dengan standar data SDI	Masih adanya data statistik sektoral yang belum dilengkapi dengan metadata statistik	Kominfo SIP.1.3.1.1
6	Kominfo SIP.1.4.1.1	Insiden siber berupa peretasan, serangan ransomware, atau kebocoran data pada sistem administrasi dan layanan publik pemda.	Belum semua sistem bersertifikasi ISO 27001 (IKAMI masih dalam tahap pemenuhan); pemanfaatan Sertifikat Elektronik/TTE belum merata di semua lini dokumen penting; kurangnya kesadaran keamanan pengguna (user awareness).	Kominfo SIP.1.4.1.1
7	Kominfo SIP.1.4.1.2	Terjadinya pemalsuan dokumen atau penolakan legitimasi hukum atas dokumen digital pemerintah.	Belum meratanya aktivasi dan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi BSSN bagi pejabat struktural/fungsional; kelalaian dalam menjaga kerahasiaan passphrase.	Kominfo SIP.1.4.1.2
8	Kominfo SIP.1.4.1.3	Terganggunya keterhubungan alat/aplikasi persandian (misal: pengiriman surat elektronik terenkripsi/Sanapati atau aplikasi sejenis) antar-titik simpul sandi.	Masalah stabilitas jaringan intra-pemerintah; adanya wilayah penempatan simpul yang mengalami gangguan teknis atau blank spot geografis di Mamuju.	Kominfo SIP.1.4.1.3

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Penyebab	Kode Penyebab
1	2	3	4	5
9	Kominfo.1.5.1.1	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak selesai tepat waktu atau tidak selaras dengan RPJMD, Renstra, dan Renja akibat data kinerja serta koordinasi antar bidang belum optimal.	Data capaian kinerja terlambat; perubahan kebijakan perencanaan; koordinasi bidang belum konsisten; revidi dokumen belum memadai.	Kominfo.1.5.1.1
10	Kominfo.1.5.1.2	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak tepat jumlah, tepat waktu, atau tepat penerima akibat data kepegawaian, perubahan status pegawai, dan proses verifikasi belum mutakhir.	Keterlambatan dalam melakukan Pemuktahiran Data Pegawai	Kominfo.1.5.1.2
11	Kominfo.1.5.1.3	Pencacatan Aset Tidak Akurat/Terlambat dan Risiko Pemanfaatan dan Pemeliharaan	Koordinasi yang lemah antara Pengurus Barang Pengguna dengan PPTK saat serah terima barang hasil pengadaan	Kominfo.1.5.1.3
12	Kominfo.1.5.1.4	Kegiatan administrasi dan pelayanan kantor terhambat.	Daftar kebutuhan barang dan logistik kantor yang belum terkendali	Kominfo.1.5.1.4
13	Kominfo.1.5.1.5	Keterlambatan dalam proses pengadaan yang disebabkan proses pengadaan melalui e-purchasing tidak sesuai jadwal	Spesifikasi teknis tidak rinci; e-katalog tidak menyediakan barang sesuai kebutuhan; survei harga terbatas; evaluasi penyedia belum memadai.	Kominfo.1.5.1.5
14	Kominfo.1.5.1.6	Tagihan jasa listrik dan air melebihi batas pagu bulanan	Pemakaian tidak terkontrol	Kominfo.1.5.1.6

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Penyebab	Kode Penyebab
1	2	3	4	5
15	Kominfosip.1.5.1.7	Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terlambat sehingga dukungan mobilitas kegiatan PD tidak optimal.	Jadwal servis dan pajak tidak dipantau berkala; kerusakan terlambat dilaporkan; dokumen kendaraan belum tertata; anggaran pemeliharaan terbatas.	Kominfosip.1.5.1.7

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Tahun : 2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Tujuan SPIP
			Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Pemilik/Pengelola	Uraian Sebab	Sumber		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tujuan : OPTIMALISASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DENGAN MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL YANG AMAN BERBASIS DATA										
1	Sasaran Startegis : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilatas Informasi Publik Bagi Masyarakat Proqram : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik									
		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah									
		Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Informasi pembangunan dan kebijakan Pemkab Mamuju tidak tersampaikan secara merata ke masyarakat di wilayah pelosok/pedalaman.	Kominfosip. 1.1.1.1	Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi dan Bidang KIP	Kondisi geografis Mamuju yang memiliki wilayah perbukitan/pesisir dengan beberapa titik blank spot; publikasi terlalu bertumpu pada media digital/sosial.	internal/ eksternal	C/UC	Terjadinya kesenjangan informasi (information gap); rendahnya partisipasi masyarakat dalam program daerah; target persentase jangkauan IKP tidak optimal	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfosip dan Masyarakat	Efektif
			Munculnya Sengketa Informasi Publik akibat keterlambatan atau penolakan pemberian informasi kepada pemohon.	Kominfosip. 1.1.1.2		Belum optimalnya komitmen PPID Pelaksana di setiap PD untuk menyeter data berkala; dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) belum mutakhir.	internal/ eksternal	C/UC	Pemkab Mamuju berisiko menghadapi gugatan di Komisi Informasi; penurunan citra transparansi daerah; menurunkan persentase kepatuhan standar IKP.	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfosip dan Masyarakat	Efektif

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Tujuan SPIP
			Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Pemilik/Pengelola	Uraian Sebab	Sumber		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Sasaran Startegis : Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi									
	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi									
	Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo	Terganggunya konektivitas dan layanan aplikasi SPBE akibat masalah geografis (blank spot) dan stabilitas jaringan (Infrastruktur & Jaringan)	Kominfosip. 1.2.1.1	Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	Kondisi geografis beberapa wilayah Mamuju yang menantang; ketergantungan pada satu provider utama; belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra-pemerintah daerah.	internal/ eksternal	C/UC	Layanan publik digital di tingkat kecamatan/desa terhambat; pengumpulan data evaluasi SPBE dari OPD pinggiran terlambat; menurunkan persentase tata kelola e-gov yang andal.	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfosip dan Masyarakat	Efektif
			Terjadinya tumpang tindih (duplikasi) aplikasi antar-PD dan minimnya integrasi data untuk aplikasi dan integrasi sistem	Kominfosip. 1.2.1.2	Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	Masih ada PD yang membangun aplikasi sendiri tanpa berkoordinasi/berbagi pakai dengan Kominfo; belum optimalnya implementasi SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah).	internal/ eksternal	C/UC	Pemborosan anggaran daerah; masyarakat/ASN harus membuat banyak akun berbeda; nilai kematangan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sulit meningkat	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfosip dan Masyarakat	
3	Sasaran Startegis : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)									
	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah									

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Tujuan SPIP
			Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Pemilik/Pengelola	Uraian Sebab	Sumber		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah yang Akurat dan Dapat Diandalkan	Belum tersedianya data statistik sektoral yang sesuai dengan standar data SDI	Kominfo SIP. 1.3.1.1	Bidang Statistik	Masih adanya data statistik sektoral yang belum dilengkapi dengan metadata statistik	Eksternal	UC	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik belum dapat dilaksanakan sepenuhnya	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju dan BPS	Efektif
	Sasaran Startegis : Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi									
	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah									
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Insiden siber berupa peretasan, serangan ransomware, atau kebocoran data pada sistem administrasi dan layanan publik pemda.	Kominfo SIP. 1.4.1.1	Bidang Persandian	Belum semua sistem bersertifikasi ISO 27001 (IKAMI masih dalam tahap pemenuhan); pemanfaatan Sertifikat Elektronik/TTE belum merata di semua lini dokumen penting; kurangnya kesadaran keamanan pengguna (user awareness).	internal/ eksternal	C/UC	Data sensitif daerah bocor; layanan e-gov lumpuh total; menurunnya kepercayaan publik terhadap digitalisasi Pemkab Mamuju.	PD Kabupaten Mamuju	Efektif
			Terjadinya pemalsuan dokumen atau penolakan legitimasi hukum atas dokumen digital pemerintah.	Kominfo SIP. 1.4.1.2	Bidang Persandian	Belum meratanya aktivasi dan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi BSSN bagi pejabat struktural/fungsional; kelalaian dalam menjaga kerahasiaan passphrase.	internal/ eksternal	C/UC	Risiko repudiation (penolakan keabsahan dokumen); proses birokrasi mandek; pemenuhan indikator tata kelola persandian menjadi rendah.	PD Kabupaten Mamuju	Efektif

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Tujuan SPIP
			Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Pemilik/Pengelola	Uraian Sebab	Sumber		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Persentase Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi	Terganggunya keterhubungan alat/aplikasi persandian (misal: pengiriman surat elektronik terenkripsi/Sanapati atau aplikasi sejenis) antar-titik simpul sandi.	Kominfo SIP. 1.4.1.3	Bidang Persandian	Masalah stabilitas jaringan intra-pemerintah; adanya wilayah penempatan simpul yang mengalami gangguan teknis atau blank spot geografis di Mamuju.	internal/ eksternal	C/UC	Persentase operasionalisasi layanan sandi menurun; pengiriman dokumen rahasia daerah terhambat atau terpaksa menggunakan jalur komunikasi terbuka yang tidak aman.	PD Kabupaten Mamuju	Efektif
5	Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Laporan Kinerja Perangkat Daerah									
		1. Bersentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 2. Bersentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 3. Bersentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pelayanan Umum Kantor									
		Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak selesai tepat waktu atau tidak selaras dengan RPJMD, Renstra, dan Renja akibat data kinerja serta koordinasi antar bidang belum optimal.	Kominfo SIP. 1.5.1.1	Sekretariat	Data capaian kinerja terlambat; perubahan kebijakan perencanaan; koordinasi bidang belum konsisten; review dokumen belum memadai.	Internal	C	Perencanaan program dan kegiatan kurang terarah, target kinerja tidak konsisten, dan proses penganggaran terhambat.	Diskominfo SIP Kabupaten Mamuju	Efektif
		Persentase Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak tepat jumlah, tepat waktu, atau tepat penerima akibat data kepegawaian, perubahan status pegawai, dan proses verifikasi belum mutakhir.	Kominfo SIP. 1.5.1.2	Sekretariat	Keterlambatan dalam melakukan Pemuktahiran Data Pegawai	Internal	C	Potensi Gaji dan Tunjangan tidak terbayarkan tepat pada waktunya	ASN Diskominfo SIP Kabupaten Mamuju	Efektif

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Tujuan SPIP
			Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Pemilik/Pengelola	Uraian Sebab	Sumber		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	Pencacatan Aset Tidak Akurat/Terlambat dan Risiko Pemanfaatan dan Pemeliharaan	Kominfofosp. 1.5.1.3	Sekretariat	Koordinasi yang lemah antara Pengurus Barang Pengguna dengan PPTK saat serah terima barang hasil pengadaan	Internal	C	Pencatatan dapat memicu selisih antara nilai fisik dan nilai akuntansi (mempengaruhi laporan keuangan daerah)	Diskominfofosp Kabupaten Mamuju	Efektif
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan administrasi dan pelayanan kantor terhambat.	Kominfofosp. 1.5.1.4	Sekretariat	Daftar kebutuhan barang dan logistik kantor yang belum terkendali	Internal	C	Pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan PD tidak optimal.	Diskominfofosp Kabupaten Mamuju	Efektif
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	Keterlambatan dalam proses pengadaan yang disebabkan proses pengadaan melalui e-purchasing tidak sesuai jadwal	Kominfofosp. 1.5.1.5	Sekretariat	Spesifikasi teknis tidak rinci; e-katalog tidak menyediakan barang sesuai kebutuhan; survei harga terbatas; evaluasi penyedia belum memadai.	Internal	C	Potensi keterlambatan pengadaan barang serta potensi temuan pengadaan meningkat	Diskominfofosp Kabupaten Mamuju	Efektif
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tagihan jasa listrik dan air melebihi batas pagu bulanan	Kominfofosp. 1.5.1.6	Sekretariat	Pemakaian tidak terkontrol	internal/ eksternal	C	Kegiatan pelayanan kantor terganggu dan risiko tunggakan atau pemborosan belanja meningkat.	Diskominfofosp Kabupaten Mamuju	Efektif
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terlambat sehingga dukungan mobilitas kegiatan PD tidak optimal.	Kominfofosp. 1.5.1.7	Sekretariat	Jadwal servis dan pajak tidak dipantau berkala; kerusakan terlambat dilaporkan; dokumen kendaraan belum tertata; anggaran pemeliharaan terbatas.	Internal	C	Kendaraan dinas tidak siap pakai, biaya perbaikan meningkat, dan risiko kehilangan manfaat aset bertambah.	Diskominfofosp Kabupaten Mamuju	Efektif

ANALISIS RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : **DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN**
Tahun : 2025

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Dampak		Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu		
		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kominfosip.1.1.1.1	Informasi pembangunan dan kebijakan Pemkab Mamuju tidak tersampaikan secara merata ke masyarakat di wilayah pelosok/pedalaman.	Terjadinya kesenjangan informasi (information gap); rendahnya partisipasi masyarakat dalam program daerah; target persentase jangkauan IKP tidak optimal.	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfosip dan Masyarakat	2	4	13	Ada	Mengintegrasikan diseminasi digital dengan penguatan media konvensional. Mengoptimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan/desa, memaksimalkan siaran keliling (mobil informasi), dan menyusun tata kelola kerja sama media massa yang transparan	Memadai	2	2	7
Kominfosip.1.1.1.2	Munculnya Sengketa Informasi Publik akibat keterlambatan atau penolakan pemberian informasi kepada pemohon.	Pemkab Mamuju berisiko menghadapi gugatan di Komisi Informasi; penurunan citra transparansi daerah; menurunkan persentase kepatuhan standar IKP.	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfosip dan Masyarakat	4	4	19	Ada	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Pemkab Mamuju dan sosialisasi ke seluruh PPID pelaksana di setiap PD	Belum Memadai	3	2	10

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Dampak		Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu		
		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kominfosip.1.2.1.1	Terganggunya konektivitas dan layanan aplikasi SPBE akibat masalah geografis (blank spot) dan stabilitas jaringan (Infrastruktur & Jaringan)	Layanan publik digital di tingkat kecamatan/desa terhambat; pengumpulan data evaluasi SPBE dari OPD pinggiran terlambat; menurunkan persentase tata kelola e-gov yang andal.	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfosip dan Masyarakat	4	4	19	Ada	Penyusunan Regulasi terkait penyelenggaraan SPBE lingkup Pemkab Mamuju	Belum Memadai	3	3	14
Kominfosip.1.2.1.2	Terjadinya tumpang tindih (duplikasi) aplikasi antar-PD dan minimnya integrasi data untuk aplikasi dan integrasi sistem	Pemborosan anggaran daerah; masyarakat/ASN harus membuat banyak akun berbeda; nilai kematangan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sulit meningkat.	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, Diskominfosip dan Masyarakat	4	4	19	Ada	Mengaktifkan rapat koordinasi rutin Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Mamuju (melibatkan Bappepan, Bagian Organisasi, BPKAD, dll.) untuk melakukan monitoring pengisian 47 indikator evaluasi SPBE secara real time	Belum Memadai	3	3	14
Kominfosip.1.3.1.1	Belum tersedianya data statistik sektoral yang sesuai dengan standar data SDI	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik belum dapat dilaksanakan sepenuhnya	Pemerintah Daerah Kab. Mamuju dan BPS	4	4	19	Ada	Penyusunan regulasi terkait penyelenggaraan SDI lingkup Pemkab Mamuju dan pembinaan statistik sektoral	Belum Memadai	3	2	10

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Dampak		Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu		
		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kominfosip.1.4.1.1	Insiden siber berupa peretasan, serangan ransomware, atau kebocoran data pada sistem administrasi dan layanan publik pemda.	Data sensitif daerah bocor; layanan e-gov lumpuh total; menurunnya kepercayaan publik terhadap digitalisasi Pemkab Mamuju.	PD Kabupaten Mamuju	4	4	19	Ada	Koordinasi lintas sektor, melakukan registrasi langsung ke PD dan evaluasi IKAMI	Belum Memadai	3	3	14
Kominfosip.1.4.1.2	Terjadinya pemalsuan dokumen atau penolakan legitimasi hukum atas dokumen digital pemerintah.	Risiko repudiation (penolakan keabsahan dokumen); proses birokrasi mandek; pemenuhan indikator tata kelola persandian menjadi rendah.	PD Kabupaten Mamuju	2	4	13	Ada	Mempercepat asistensi aktivasi Sertifikat Elektronik yang bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN secara jemput bola ke PD, serta mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan passphrase (PIN) TTE	Memadai	1	2	3
Kominfosip.1.4.1.3	Terganggunya keterhubungan alat/aplikasi persandian (misal: pengiriman surat elektronik terenkripsi/Sanapati atau aplikasi sejenis) antar-titik simpul sandi.	Persentase operasionalisasi layanan sandi menurun; pengiriman dokumen rahasia daerah terhambat atau terpaksa menggunakan jalur komunikasi terbuka yang tidak aman.	PD Kabupaten Mamuju	4	4	19	Ada	Masih menggunakan jalur komunikasi terbuka yaitu surat sanapati di distribusikan oleh pegawai yang bertanggung jawab pada email sanapati	Belum Memadai	3	3	14

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Dampak		Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu		
		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kominfosip.1.5.1.1	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak selesai tepat waktu atau tidak selaras dengan RPJMD, Renstra, dan Renja akibat data kinerja serta koordinasi antar bidang belum optimal.	Perencanaan program dan kegiatan kurang terarah, target kinerja tidak konsisten, dan proses penganggaran terhambat.	Diskominfosip Kabupaten Mamuju	2	2	7	Ada	Koordinasi internal penyusunan dokumen perencanaan, reviu sekretariat, dan penyesuaian dokumen dengan pagu, indikator, dan evaluasi capaian kinerja.	Memadai	1	2	3
Kominfosip.1.5.1.2	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak tepat jumlah, tepat waktu, atau tepat penerima akibat data kepegawaian, perubahan status pegawai, dan proses verifikasi belum mutakhir.	Potensi Gaji dan Tunjangan tidak terbayarkan tepat pada waktunya	ASN Diskominfosip Kabupaten Mamuju	2	3	11	Ada	Verifikasi daftar gaji, pembaruan data pegawai, dan rekonsiliasi dengan dokumen kepegawaian.	Memadai	1	2	3
Kominfosip.1.5.1.3	Pencacatan Aset Tidak Akurat/Terlambat dan Risiko Pemanfaatan dan Pemeliharaan	Pencatatan dapat memicu selisih antara nilai fisik dan nilai akuntansi (mempengaruhi laporan keuangan daerah)	Diskominfosip Kabupaten Mamuju	3	2	10	Ada	Rekonsiliasi data aset antara Pengurus Barang, Pejabat Keuangan, dan Bidang Aset Daerah secara periodik (bulanan/triwulanan)	Memadai	1	2	3
Kominfosip.1.5.1.4	Kegiatan administrasi dan pelayanan kantor terhambat.	Pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan PD tidak optimal.	Diskominfosip Kabupaten Mamuju	2	2	7	Ada	Identifikasi ketersediaan kebutuhan barang dan melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan umum kantor	Memadai	2	2	7

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Dampak		Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu		
		Uraian Dampak	Pihak Terdampak	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kominfosip.1.5.1.5	Keterlambatan dalam proses pengadaan yang disebabkan proses pengadaan melalui e-purchasing tidak sesuai jadwal	Potensi keterlambatan pengadaan barang serta potensi temuan pengadaan meningkat	Diskominfosip Kabupaten Mamuju	3	2	10	Ada	Penyusunan spesifikasi teknis, survei harga, pemilihan penyedia, dan pemeriksaan hasil pengadaan.	Memadai	2	2	7
Kominfosip.1.5.1.6	Tagihan jasa listrik dan air melebihi batas pagu bulanan	Kegiatan pelayanan kantor terganggu dan risiko tunggakan atau pemborosan belanja meningkat.	Diskominfosip Kabupaten Mamuju	2	2	7	Ada	Melakukan upaya penghematan pemakaian yang tidak penting	Memadai	2	2	7
Kominfosip.1.5.1.7	Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terlambat sehingga dukungan mobilitas kegiatan PD tidak optimal.	Kendaraan dinas tidak siap pakai, biaya perbaikan meningkat, dan risiko kehilangan manfaat aset bertambah.	Diskominfosip Kabupaten Mamuju	2	2	7	Ada	Pencatatan kendaraan, pemantauan pajak, servis berkala, dan dokumen pemeliharaan kendaraan dinas.	Memadai	1	2	3

DAFTAR RISIKO PRIORITAS UNIT KERJA

Nama Unit Pemilik Risiko : **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Tahun : 2026

Selera Risiko Pemilik Risiko: 5

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko Residu		
		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5
Kominfosip.1.1.1.1	Informasi pembangunan dan kebijakan Pemkab Mamuju tidak tersampaikan secara merata ke masyarakat di wilayah pelosok/pedalaman.	2	2	7
Kominfosip.1.1.1.2	Munculnya Sengketa Informasi Publik akibat keterlambatan atau penolakan pemberian informasi kepada pemohon.	3	2	10
Kominfosip.1.2.1.1	Terganggunya konektivitas dan layanan aplikasi SPBE akibat masalah geografis (blank spot) dan stabilitas jaringan (Infrastruktur & Jaringan)	3	3	14
Kominfosip.1.2.1.2	Terjadinya tumpang tindih (duplikasi) aplikasi antar-PD dan minimnya integrasi data untuk aplikasi dan integrasi sistem	3	3	14
Kominfosip.1.3.1.1	Belum tersedianya data statistik sektoral yang sesuai dengan standar data SDI	3	2	10
Kominfosip.1.4.1.1	Insiden siber berupa peretasan, serangan ransomware, atau kebocoran data pada sistem administrasi dan layanan publik pemda.	3	3	14
Kominfosip.1.4.1.2	Terjadinya pemalsuan dokumen atau penolakan legitimasi hukum atas dokumen digital pemerintah.	1	2	3
Kominfosip.1.4.1.3	Terganggunya keterhubungan alat/aplikasi persandian (misal: pengiriman surat elektronik terenkripsi/Sanapati atau aplikasi sejenis) antar-titik simpul sandi.	3	3	14
Kominfosip.1.5.1.1	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak selesai tepat waktu atau tidak selaras dengan RPJMD, Renstra, dan Renja akibat data kinerja serta koordinasi antar bidang belum optimal.	1	2	3
Kominfosip.1.5.1.2	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak tepat jumlah, tepat waktu, atau tepat penerima akibat data kepegawaian, perubahan status pegawai, dan proses verifikasi belum mutakhir.	1	2	3
Kominfosip.1.5.1.3	Pencacatan Aset Tidak Akurat/Terlambat dan Risiko Pemanfaatan dan Pemeliharaan	1	2	3
Kominfosip.1.5.1.4	Kegiatan administrasi dan pelayanan kantor terhambat.	2	2	7
Kominfosip.1.5.1.5	Keterlambatan dalam proses pengadaan yang disebabkan proses pengadaan melalui e-purchasing tidak sesuai jadwal	2	2	7
Kominfosip.1.5.1.6	Tagihan jasa listrik dan air melebihi batas pagu bulanan	2	2	7
Kominfosip.1.5.1.7	Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terlambat sehingga dukungan mobilitas kegiatan PD tidak optimal.	1	2	3

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama Unit Pemilik Risiko : **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
Tahun : 2026

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Pernyataan Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Pemilik/Penanggung Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Informasi pembangunan dan kebijakan Pemkab Mamuju tidak tersampaikan secara merata ke masyarakat di wilayah pelosok/pedalaman.	Mengurangi Dampak	Kominfo ip.1.1.1.1	Mengintegrasikan diseminasi digital dengan penguatan media konvensional. Mengoptimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan/desa, memaksimalkan siaran keliling (mobil informasi), dan menyusun tata kelola kerja sama media massa yang transparan	Diseminasi dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju tidak tersampaikan kepada masyarakat	Kondisi geografis Mamuju yang memiliki wilayah perbukitan/pesisir dengan beberapa titik blank spot; publikasi terlalu bertumpu pada media digital/sosial.	Melakukan Pembinaan KIM di Kecamatan dengan Memprioritaskan KIM yang aktif melakukan Informasi kepada masyarakat	Pengendalian Penyebaran Informasi	Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi dan Bidang KIP	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	12 Bulan
2	Munculnya Sengketa Informasi Publik akibat keterlambatan atau penolakan pemberian informasi kepada pemohon.	Mengurangi Dampak	Kominfo ip.1.1.1.2	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Pemkab Mamuju dan sosialisasi ke seluruh PPID pelaksana di setiap PD	Terjadinya sengketa informasi jika Pemkab. Mamuju belum memiliki kebijakan terkait penyelenggaraan layanan informasi publik	Belum optimalnya komitmen PPID Pelaksana di setiap PD untuk menyeter data berkala; dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) belum mutakhir.	Percepatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kabupaten Mamuju	Pengendalian Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi dan Bidang KIP	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	12 Bulan

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Pernyataan Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Pemilik/Penanggu ng Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Terganggunya konektivitas dan layanan aplikasi SPBE akibat masalah geografis (blank spot) dan stabilitas jaringan (Infrastruktur & Jaringan)	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.2.1.1	Penyusunan Regulasi terkait penyelenggaraan SPBE lingkup Pemkab Mamuju	Efisiensi anggaran aplikasi dan kestabilan akses jaringan e-government di lingkungan Pemkab Mamuju.	Kondisi geografis beberapa wilayah Mamuju yang menantang; ketergantungan pada satu provider utama; belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra-pemerintah daerah.	Pengusulan kepada Kementerian KOMDIGI melalui BAKTI KOMDIGI mengenai jaringan baru khususnya pada area wilayah blankspot	Pengendalian Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Bidang Infrastuktur dan Teknologi Digital	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo	12 Bulan
4	Terjadinya tumpang tindih (duplikasi) aplikasi antar-PD dan minimnya integrasi data untuk aplikasi dan integrasi sistem	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.2.1.2	Mengaktifkan rapat koordinasi rutin Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Mamuju (melibatkan Bappepan, Bagian Organisasi, BPKAD, dll.) untuk melakukan monitoring pengisian 47 indikator evaluasi SPBE secara real-time	Pengimplementasian Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi tidak efektif dan efisien	Masih ada PD yang membangun aplikasi sendiri tanpa berkoordinasi/berbagi pakai dengan Kominfo; belum optimalnya implementasi SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	Memetakan kembali prioritas perluasan jaringan intra-pemerintah, mengoptimalkan pusat data (Government Cloud/PDN) dan atau integrasi jaringan yang terpusat di Dinas Kominfosip	Pengendalian Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Bidang Infrastuktur dan Teknologi Digital	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo	12 Bulan
5	Belum tersedianya data statistik sektoral yang sesuai dengan standar data SDI	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.3.1.1	Penyusunan regulasi terkait penyelenggaraan SDI lingkup Pemkab Mamuju dan pembinaan statistik sektoral	Kualitas data statistik sektoral yang tidak sesuai dengan standar data SDI	Masih adanya data statistik sektoral yang belum dilengkapi dengan metadata statistik	Melakukan pembinaan Statistik Sektoral secara berkala untuk menghasilkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah yang Akurat dan Dapat Diandalkan	Pengendalian Statistik	Bidang Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah yang Akurat dan Dapat Diandalkan	12 Bulan

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Pernyataan Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Pemilik/Penanggu ng Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Insiden siber berupa peretasan, serangan ransomware, atau kebocoran data pada sistem administrasi dan layanan publik pemda.	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.4.1.1	Koordinasi lintas sektor, melakukan registrasi langsung ke PD dan evaluasi IKAMI	Birokrasi pelayanan publik akan terhambat	Belum semua sistem bersertifikasi ISO 27001 (IKAMI masih dalam tahap pemenuhan); pemanfaatan Sertifikat Elektronik/TTE belum merata di semua lini dokumen penting; kurangnya kesadaran keamanan pengguna (user awareness).	Mengoptimalkan peran Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) daerah yang telah dibentuk, mempercepat peningkatan skor Indeks Keamanan Informasi (IKAMI)	Pengendalian Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Bidang Persandian	1. Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	12 Bulan
7	Terjadinya pemalsuan dokumen atau penolakan legitimasi hukum atas dokumen digital pemerintah.	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.4.1.2	Mempercepat asistensi aktivasi Sertifikat Elektronik yang bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN secara jemput bola ke PD, serta mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan passphrase (PIN) TTE	Masih adanya pegawai yang telah melakukan aktivasi TTE tapi belum memahami cara pemanfaatan TTE	Belum meratanya aktivasi dan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi BSSN bagi pejabat struktural/fungsional; kelalaian dalam menjaga kerahasiaan passphrase.	memperluas kewajiban aktivasi dan penggunaan Tanda Tangan Digital/TTE bagi seluruh pejabat/ASN pengambil keputusan	Pengendalian Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Bidang Persandian	1. Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	12 Bulan

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Pernyataan Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Pemilik/Penanggu ng Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Terganggunya keterhubungan alat/aplikasi persandian (misal: pengiriman surat elektronik terenkripsi/Sanapati atau aplikasi sejenis) antar-titik simpul sandi.	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.4.1.3	Masih menggunakan jalur komunikasi terbuka yaitu surat sanapati di distribusikan oleh pegawai yang bertanggung jawab pada email sanapati	Terjadinya kebocoran informasi yang sifatnya rahasia	Masalah stabilitas jaringan intra-pemerintah; adanya wilayah penempatan simpul yang mengalami gangguan teknis atau blank spot geografis di Mamuju.	Membangun atau mengalokasikan jalur komunikasi virtual yang terisolasi (VPN khusus/jaringan intra-pemda) untuk menghubungkan simpul-simpul persandian utama	Pembinaan SDM	Bidang Persandian	2. Persentase Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi	12 Bulan
9	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak selesai tepat waktu atau tidak selaras dengan RPJMD, Renstra, dan Renja akibat data kinerja serta koordinasi antar bidang belum optimal.	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.5.1.1	Koordinasi internal penyusunan dokumen perencanaan, reviu sekretariat, dan penyesuaian dokumen dengan pagu, indikator, dan evaluasi capaian kinerja	Laporan realisasi capaian kinerja bidang tidak konsisten dilaporkan sesuai jadwal perencanaan	Data capaian kinerja terlambat; perubahan kebijakan perencanaan; koordinasi bidang belum konsisten; reviu dokumen belum memadai.	Melakukan monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja	Pembinaan SDM	Sekretariat	Persentase Keselerasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan
10	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak tepat jumlah, tepat waktu, atau tepat penerima akibat data kepegawaian, perubahan status pegawai, dan proses verifikasi belum mutakhir.	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.5.1.2	Verifikasi daftar gaji, pembaruan data pegawai, dan rekonsiliasi dengan dokumen kepegawaian.	Kesadaran pegawai untuk melakukan pembaharuan data pegawai dan keluarga yang sering diabaikan	Keterlambatan dalam melakukan Pemuktahiran Data Pegawai	Melakukan rekonsiliasi data pegawai dan keluarga setiap awal bulan serta membuat bukti verifikasi sebelum pembayaran gaji/tunjangan.	Pembinaan SDM	Sekretariat	Persentase Dokumen/Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia	12 Bulan
11	Pencacatan Aset Tidak Akurat/Terlambat dan Risiko Pemanfaatan dan Pemeliharaan	Mengurangi Dampak	Kominfos ip.1.5.1.3	Rekonsiliasi data aset antara Pengurus Barang, Pejabat Keuangan, dan Bidang Aset Daerah secara periodik (bulanan/triwulanan)	Pencatatan data aset yang tidak akurat/terlambat	Koordinasi yang lemah antara Pengurus Barang Pengguna dengan PPTK saat serah terima barang hasil pengadaan	Rekonsialiasi data aset secara periodik bulanan/triwulan/se mesteran	Pembinaan SDM	Sekretariat	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	12 Bulan

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Pernyataan Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Pemilik/Penanggu ng Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Kegiatan administrasi dan pelayanan kantor terhambat.	Mengurangi Dampak	Kominfo sip.1.5.1.4	Identifikasi ketersediaan kebutuhan barang dan melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan umum kantor.	Daftar kebutuhan barang dan logistik kantor belum berbasis data pemakaian	Daftar kebutuhan barang dan logistik kantor yang belum terkendali	Membuat kartu kendali kebutuhan dan logistik kantor	Pembinaan SDM	Sekretariat	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
13	Keterlambatan dalam proses pengadaan yang disebabkan proses pengadaan melalui e-purchasing tidak sesuai jadwal	Mengurangi Dampak	Kominfo sip.1.5.1.5	Penyusunan spesifikasi teknis, survei harga, pemilihan penyedia, dan pemeriksaan hasil pengadaan.	Spesifikasi barang, ketersediaan pagu dan rencana kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi	Spesifikasi teknis tidak rinci; e-katalog tidak menyediakan barang sesuai kebutuhan; survei harga terbatas; evaluasi penyedia belum memadai.	Membuat kartu kendali kebutuhan pengadaan yang menjadi prioritas dan sesuai ketersediaan pagu anggaran	Pembinaan SDM	Sekretariat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	12 Bulan
14	Tagihan jasa listrik dan air melebihi batas pagu bulanan	Mengurangi Dampak	Kominfo sip.1.5.1.6	Melakukan upaya penghematan pemakaian yang tidak penting	Tagihan akan jasa sumber daya melebihi batas pagu bulanan	Pemakaian tidak terkontrol	Melakukan upaya penghematan pemakaian sumber daya yang tidak penting	Pembinaan SDM	Sekretariat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12 Bulan
15	Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terlambat sehingga dukungan mobilitas kegiatan PD tidak optimal.	Mengurangi Dampak	Kominfo sip.1.5.1.7	Pencatatan kendaraan, pemantauan pajak, servis berkala, dan dokumen pemeliharaan kendaraan dinas.	Riwayat servis, jadwal jatuh tempo pajak, dan laporan kerusakan belum selalu diperbarui tepat waktu.	Jadwal servis dan pajak tidak dipantau berkala; kerusakan terlambat dilaporkan; dokumen kendaraan belum tertata; anggaran pemeliharaan terbatas.	Membuat kartu kendali kendaraan, jadwal servis dan pajak, serta laporan kondisi kendaraan secara berkala.	Pembinaan SDM	Sekretariat	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan

ANALISIS AKAR MASALAH

Nama Unit Pemilik Risiko : **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Tahun : 2026

Selera Risiko Pemilik Risiko: 5

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Penyebab	Kode Penyebab
1	2	3	4	5
1	Kominfosip.1.1.1.1	Informasi pembangunan dan kebijakan Pemkab Mamuju tidak tersampaikan secara merata ke masyarakat di wilayah pelosok/pedalaman.	Kondisi geografis Mamuju yang memiliki wilayah perbukitan/pesisir dengan beberapa titik blank spot; publikasi terlalu bertumpu pada media digital/sosial.	Kominfosip.1.1.1.1
2	Kominfosip.1.1.1.2	Munculnya Sengketa Informasi Publik akibat keterlambatan atau penolakan pemberian informasi kepada pemohon.	Belum optimalnya komitmen PPID Pelaksana di setiap PD untuk menyetor data berkala; dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) belum mutakhir.	Kominfosip.1.1.1.2
3	Kominfosip.1.2.1.1	Terganggunya konektivitas dan layanan aplikasi SPBE akibat masalah geografis (blank spot) dan stabilitas jaringan (Infrastruktur & Jaringan)	Kondisi geografis beberapa wilayah Mamuju yang menantang; ketergantungan pada satu provider utama; belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra-pemerintah daerah.	Kominfosip.1.2.1.1

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Penyebab	Kode Penyebab
1	2	3	4	5
4	Kominfo SIP.1.2.1.2	Terjadinya tumpang tindih (duplikasi) aplikasi antar-PD dan minimnya integrasi data untuk aplikasi dan integrasi sistem	Masih ada PD yang membangun aplikasi sendiri tanpa berkoordinasi/berbagi pakai dengan Kominfo; belum optimalnya implementasi SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah).	Kominfo SIP.1.2.1.2
5	Kominfo SIP.1.3.1.1	Belum tersedianya data statistik sektoral yang sesuai dengan standar data SDI	Masih adanya data statistik sektoral yang belum dilengkapi dengan metadata statistik	Kominfo SIP.1.3.1.1
6	Kominfo SIP.1.4.1.1	Insiden siber berupa peretasan, serangan ransomware, atau kebocoran data pada sistem administrasi dan layanan publik pemda.	Belum semua sistem bersertifikasi ISO 27001 (IKAMI masih dalam tahap pemenuhan); pemanfaatan Sertifikat Elektronik/TTE belum merata di semua lini dokumen penting; kurangnya kesadaran keamanan pengguna (user awareness).	Kominfo SIP.1.4.1.1
7	Kominfo SIP.1.4.1.2	Terjadinya pemalsuan dokumen atau penolakan legitimasi hukum atas dokumen digital pemerintah.	Belum meratanya aktivasi dan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi BSSN bagi pejabat struktural/fungsional; kelalaian dalam menjaga kerahasiaan passphrase.	Kominfo SIP.1.4.1.2
8	Kominfo SIP.1.4.1.3	Terganggunya keterhubungan alat/aplikasi persandian (misal: pengiriman surat elektronik terenkripsi/Sanapati atau aplikasi sejenis) antar-titik simpul sandi.	Masalah stabilitas jaringan intra-pemerintah; adanya wilayah penempatan simpul yang mengalami gangguan teknis atau blank spot geografis di Mamuju.	Kominfo SIP.1.4.1.3

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Penyebab	Kode Penyebab
1	2	3	4	5
9	Kominfo SIP.1.5.1.1	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak selesai tepat waktu atau tidak selaras dengan RPJMD, Renstra, dan Renja akibat data kinerja serta koordinasi antar bidang belum optimal.	Data capaian kinerja terlambat; perubahan kebijakan perencanaan; koordinasi bidang belum konsisten; revidi dokumen belum memadai.	Kominfo SIP.1.5.1.1
10	Kominfo SIP.1.5.1.2	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak tepat jumlah, tepat waktu, atau tepat penerima akibat data kepegawaian, perubahan status pegawai, dan proses verifikasi belum mutakhir.	Keterlambatan dalam melakukan Pemuktahiran Data Pegawai	Kominfo SIP.1.5.1.2
11	Kominfo SIP.1.5.1.3	Pencacatan Aset Tidak Akurat/Terlambat dan Risiko Pemanfaatan dan Pemeliharaan	Koordinasi yang lemah antara Pengurus Barang Pengguna dengan PPTK saat serah terima barang hasil pengadaan	Kominfo SIP.1.5.1.3
12	Kominfo SIP.1.5.1.4	Kegiatan administrasi dan pelayanan kantor terhambat.	Daftar kebutuhan barang dan logistik kantor yang belum terkendali	Kominfo SIP.1.5.1.4
13	Kominfo SIP.1.5.1.5	Keterlambatan dalam proses pengadaan yang disebabkan proses pengadaan melalui e-purchasing tidak sesuai jadwal	Spesifikasi teknis tidak rinci; e-katalog tidak menyediakan barang sesuai kebutuhan; survei harga terbatas; evaluasi penyedia belum memadai.	Kominfo SIP.1.5.1.5
14	Kominfo SIP.1.5.1.6	Tagihan jasa listrik dan air melebihi batas pagu bulanan	Pemakaian tidak terkontrol	Kominfo SIP.1.5.1.6

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Penyebab	Kode Penyebab
1	2	3	4	5
15	Kominfosip.1.5.1.7	Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terlambat sehingga dukungan mobilitas kegiatan PD tidak optimal.	Jadwal servis dan pajak tidak dipantau berkala; kerusakan terlambat dilaporkan; dokumen kendaraan belum tertata; anggaran pemeliharaan terbatas.	Kominfosip.1.5.1.7